


# POTENSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG

Untuk Mendukung Rantai Pasok **Koperasi Merah Putih**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Analisis .....	9
1.4 Batasan Masalah.....	10
<b>BAB II DATA DAN METODOLOGI .....</b>	<b>11</b>
2.1. Sumber dan Jenis Data .....	12
2.2. Metodologi Analisis .....	14
2.2.1 Analisis Spasial untuk Pemetaan Lahan Pertanian .....	15
2.2.2 Analisis Persentase Cakupan Perlindungan Lahan .....	17
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Pendahuluan.....	19
3.2. Potensi Lahan Pertanian .....	19



3.2.1 Sebaran Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Bandung 2024.....	22
3.2.2 Sebaran Lahan Sawah Tadah Hujan Kabupaten Bandung 2024 .....	23
<b>BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>27</b>
4.1. Simpulan.....	28
4.2. Rekomendasi.....	30



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Luas Lahan Pertanian Kabupaten Bandung 2019-2024 .....	12
<b>Tabel 2.</b> Luas Lahan Pertanian per Kecamatan 2024 .....	13
<b>Tabel 3.</b> Skema Perlindungan Lahan Sawah di Kabupaten Bandung .	14
<b>Tabel 6.</b> Cakupan Perlindungan Lahan Pertanian 2021-2024 .....	25

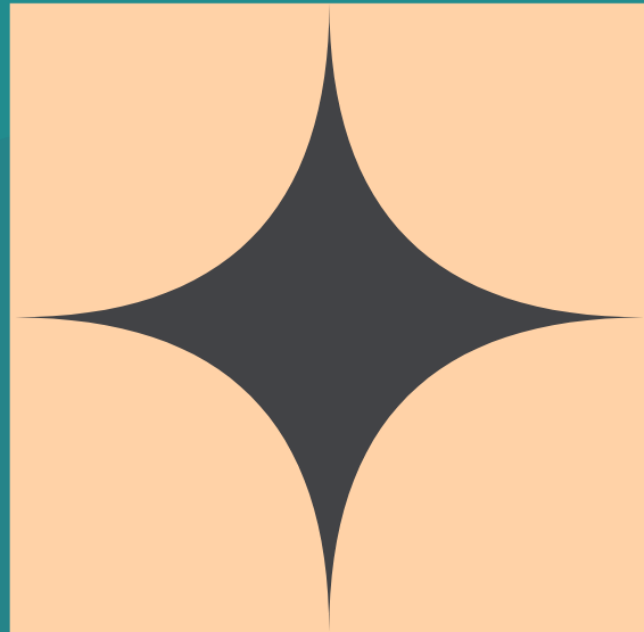


## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Luas Lahan Pertanian (Hektare) Kabupaten Bandung 2019-2024 .....	20
<b>Gambar 2.</b> Sebaran Luas Lahan Pertanian (Hektare) per Kecamatan di Kabupaten Bandung 2024 .....	21
<b>Gambar 3.</b> Sebaran Luas Lahan Sawah Irigasi (Hektare) per Kecamatan di Kabupaten Bandung 2024 .....	22
<b>Gambar 4.</b> Sebaran Luas Lahan Sawah Tadah Hujan (Hektare) per Kecamatan di Kabupaten Bandung 2024 .....	23

# BAB I


# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam struktur perekonomian sekaligus menopang ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Bandung. Meskipun hanya sekitar 32.070 jiwa atau 0,83% penduduk yang bekerja langsung di sektor ini, aktivitas pertanian tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kabupaten Bandung juga memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan karena setiap kecamatan memiliki karakteristik lahan berbeda mulai dari lahan sawah irigasi dan tadah hujan yang membuka peluang munculnya komoditas unggulan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal tersebut, Koperasi Merah Putih (KMP) hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 262 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah aktif beroperasi di Kabupaten Bandung. KMP tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok, penampung hasil pertanian, serta sarana distribusi produk ke pasar yang lebih luas.




Menurut Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, keberadaan KMP penting untuk menjaga stabilitas ekonomi desa, termasuk memastikan hasil pertanian terserap dengan baik tanpa bergantung pada tengkulak.

Bupati Bandung Dadang Supriatna turut menegaskan bahwa KMP memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika koperasi berjalan optimal, hasil panen warga dapat dibeli, diolah, dan disalurkan kembali ke berbagai program pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau lebih dari 1,2 juta penerima manfaat di Kabupaten Bandung. Bahkan, apabila produksi pertanian melampaui kebutuhan lokal, komoditas tersebut dapat dipasarkan ke daerah lain di Jawa Barat sehingga menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah.

Dengan besarnya peluang tersebut, diperlukan suatu analisis yang tidak hanya melihat peran KMP dari sisi kelembagaan, tetapi juga meninjau kesiapan dan potensi wilayah dari sisi sumber daya alam pertaniannya. Informasi mengenai jenis lahan, kecocokan komoditas, serta sebaran wilayah produktif menjadi kunci agar KMP dapat mengembangkan usaha yang selaras dengan kondisi lapangan dan





kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini berfokus pada pemetaan potensi lahan pertanian Kabupaten Bandung sebagai dasar untuk mengidentifikasi wilayah unggulan yang mampu mendukung penguatan rantai pasok Koperasi Merah Putih secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran potensi dan karakteristik lahan pertanian di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung?
2. Komoditas pertanian apa saja yang sesuai dengan kondisi lahan pada masing-masing wilayah?

## 1.3 Tujuan Analisis

Tujuan dari penyusunan analisis ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi serta karakteristik lahan pertanian di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung.

- 
2. Menentukan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi lahan pada masing-masing wilayah sebagai dasar penguatan rantai pasok Koperasi Merah Putih.

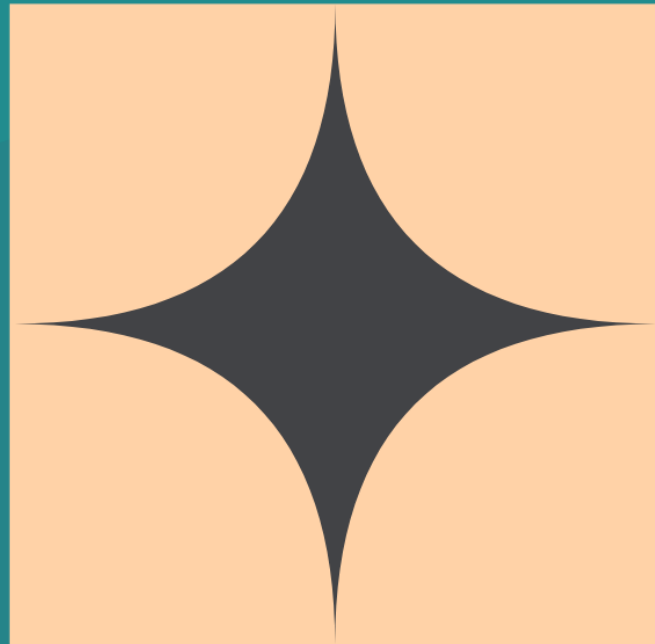
#### 1.4 Batasan Masalah

Analisis ini dibatasi pada kajian mengenai potensi dan karakteristik lahan pertanian di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai landasan untuk mendukung penguatan rantai pasok Koperasi Merah Putih (KMP). Ruang lingkup pembahasan hanya mencakup kondisi fisik wilayah dan kesesuaian lahan terhadap komoditas pertanian tanpa menilai aspek manajerial, kelembagaan, atau operasional internal KMP. Rekomendasi yang dihasilkan difokuskan pada pemanfaatan potensi wilayah untuk pengembangan usaha KMP dalam mendukung produksi pertanian yang sesuai dengan jenis dan karakteristik lahan di masing-masing kecamatan.

# BAB II

# DATA DAN

# METODOLOGI



## 2.1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder tahun 2021-2024 yang bersumber dari Portal Satu Data Kabupaten Bandung dan diunggah oleh perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Jenis data yang dianalisis mencakup data luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung secara keseluruhan serta rincinya per kecamatan yang dibedakan menjadi lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan. Selain itu, digunakan pula data mengenai skema perlindungan lahan yang meliputi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), serta penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Seluruh data yang digunakan disajikan dalam tabel-tabel pada Bab 2.

**Tabel 1.** Luas Lahan Pertanian Kabupaten Bandung 2019-2024

Tahun	Luas Lahan Pertanian (Hektare)
2019	31.161
2020	31.158
2021	31.158
2022	31.106
2023	31.106
2024	28.800

**Sumber:** Portal Satu Data Kabupaten Bandung

**Tabel 2. Luas Lahan Pertanian per Kecamatan 2024**

Kecamatan	Sawah Irigasi (Hektare)	Sawah Tadah Hujan (Hektare)	Total Keseluruhan (Hektare)
Arjasari	780,14	397,91	1178,05
Baleendah	956,89	118,43	1075,32
Banjaran	979,99	218,01	1198
Bojongsoang	538,23	888,35	1426,58
Cangkuang	651,19	104,83	756,02
Cicalengka	381,12	417,63	798,75
Cikancung	343,07	490,65	833,72
Cilengkrang	67,07	118,92	185,99
Cileunyi	392,87	360,53	753,4
Cimaung	998,2	325,64	1323,84
Cimencyan	0	110,32	110,32
Ciparay	2550,09	83,48	2633,57
Ciwidey	907,66	418,92	1326,58
Dayeuhkolot	115,84	28,89	144,73
Ibun	747,09	340,75	1087,84
Katapang	609,79	12,9	622,69
Kertasari	73,48	0,84	74,32
Kutawaringin	978,93	128,2	1107,13
Majalaya	1129,14	18,95	1148,09
Margaasih	419,02	8,72	427,74
Margahayu	0	54,43	54,43
Nagreg	172,14	112,43	284,57
Pacet	1166,71	310,84	1477,55
Pameungpeuk	663,36	5,09	668,45
Pangalengan	255,09	25,09	280,18
Paseh	1112,47	252,71	1365,18
Pasirjambu	259,44	423,59	683,03
Rancabali	478,16	29,71	507,87
Rancaekek	1582,18	1463,69	3045,87
Solokanjeruk	838,94	804,45	1643,39
Soreang	523,26	53,29	576,55

**Sumber:** Portal Satu Data Kabupaten Bandung 2024

**Tabel 3.** Skema Perlindungan Lahan Sawah di Kabupaten Bandung

Tahun	LP2B (Hektare)	AUTP (Hektare)	Penanggulangan OPT (Hektare)
2021	16.915,5	0	30
2022	16.915,5	23.093	500
2023	16.915,5	538,69	381
2024	16.915,5	1.732,95	38

*Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Bandung 2024*

## 2.2. Metodologi Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi lahan pertanian dan tingkat perlindungannya secara numerik berdasarkan data yang tersedia. Analisis ini digunakan untuk menghitung persentase cakupan LP2B, AUTP, dan penanggulangan OPT terhadap total luas lahan pertanian. Selanjutnya, digunakan pula analisis spasial untuk memvisualisasikan distribusi lahan pertanian menurut jenisnya (lahan pertanian irigasi dan lahan pertanian tadah hujan). Metode ini membantu melihat keragaman spasial antar wilayah dan mengidentifikasi kecamatan yang memiliki potensi maupun kerentanan lahan.

### 2.2.1 Analisis Spasial untuk Pemetaan Lahan Pertanian

Pemetaan dilakukan menggunakan perangkat lunak QGIS 3.40.10 dengan pendekatan *choropleth mapping*, yaitu visualisasi data numerik berbasis wilayah administrasi. Data spasial yang digunakan berupa shapefile batas administrasi kecamatan Kabupaten Bandung, sedangkan data atribut berupa luas lahan (irigasi dan tadah hujan) dalam satuan hektare.

#### **Tahapan Pemetaan Spasial:**

##### **1. Persiapan Data**

Proses pengolahan data spasial dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, *shapefile* batas kecamatan Kabupaten Bandung diimpor ke dalam QGIS sebagai dasar pemetaan wilayah. Selanjutnya, dilakukan proses *join* antara layer spasial tersebut dengan data atribut dalam format CSV menggunakan kecocokan nama kecamatan sebagai penghubung. Setelah kedua data tergabung, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat *missing value*, duplikasi, ataupun ketidaksesuaian format pada variabel

numerik. Tahap terakhir adalah standarisasi format data agar seluruh variabel siap digunakan dalam proses visualisasi dan analisis spasial.

## **2. *Choropleth Mapping* (Pemetaan Tematik)**

Pemetaan spasial digunakan untuk menggambarkan variasi dan persebaran luas lahan pertanian antar kecamatan. Proses klasifikasi menggunakan metode *Equal Interval*, yaitu teknik yang membagi rentang data ke dalam beberapa interval dengan ukuran yang sama. Metode ini dipilih karena memberikan interpretasi yang sederhana, konsisten, dan memudahkan perbandingan antarwilayah, khususnya dalam kegiatan perencanaan maupun evaluasi wilayah. Hasil pemetaan kemudian dibagi ke dalam lima kategori, yaitu Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Visualisasi dilakukan menggunakan gradasi warna dari terang (nilai kecil) ke gelap (nilai besar) yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan lahan pertanian tertinggi dan terendah.



### 2.2.2 Analisis Persentase Cakupan Perlindungan Lahan

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung cakupan perlindungan lahan pertanian melalui tiga indikator, yaitu LP2B, AOTP, dan Penanggulangan OPT/Bencana Pertanian. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perlindungan lahan telah diterapkan di Kabupaten Bandung dengan rumus spesifik per indikator sebagai berikut, di mana  $t$  merupakan simbol untuk tahun.

#### 1. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

$$LP2B_t = \frac{\text{Luas LP2B}_t}{\text{Total Luas Lahan Pertanian}_t} \times 100\%$$

#### 2. AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi)

$$AOTP_t = \frac{\text{Luas Lahan Diasuransikan}_t}{\text{Total Lahan Pertanian}_t} \times 100\%$$

#### 3. Penanggulangan OPT dan Bencana Pertanian

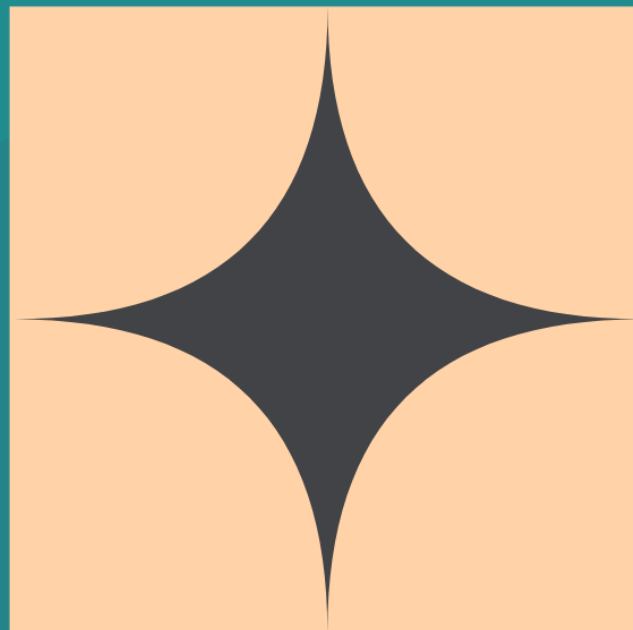
$$OPT_t = \frac{\text{Luas Lahan yang Ditangani}_t}{\text{Total Lahan Pertanian}_t} \times 100\%$$

Melalui perhitungan tersebut, diperoleh nilai persentase cakupan perlindungan lahan pertanian pada tiap indikator dan tahun yang kemudian dapat memberikan pemahaman mengenai tingkat perlindungan lahan antarwilayah serta kesenjangan yang masih perlu ditindaklanjuti.

# **BAB III**

# **HASIL DAN**

# **PEMBAHASAN**



### 3.1. Pendahuluan

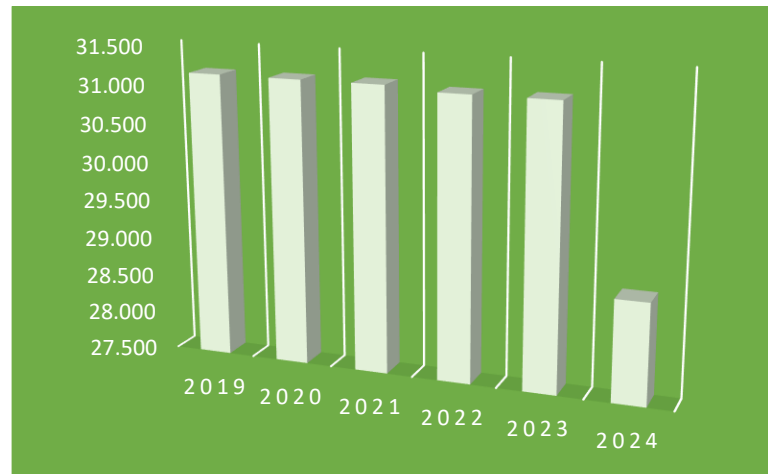
Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan berdasarkan metodologi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis mencakup dua bagian utama, yaitu pemetaan spasial potensi lahan pertanian (irigasi dan tadah hujan) serta analisis deskriptif kuantitatif untuk mengukur tingkat perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung melalui tiga indikator, yaitu LP2B, AOTP, dan Penanggulangan OPT/Bencana Pertanian.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta tematik (choropleth) untuk memberikan gambaran kuantitatif dan spasial terkait kondisi lahan pertanian. Selain itu, pembahasan dilakukan untuk menginterpretasikan temuan data, mengidentifikasi wilayah prioritas, serta mengaitkan hasil dengan potensi penguatan ketahanan pangan dan peluang strategis bagi Koperasi Merah Putih.

### 3.2. Potensi Lahan Pertanian

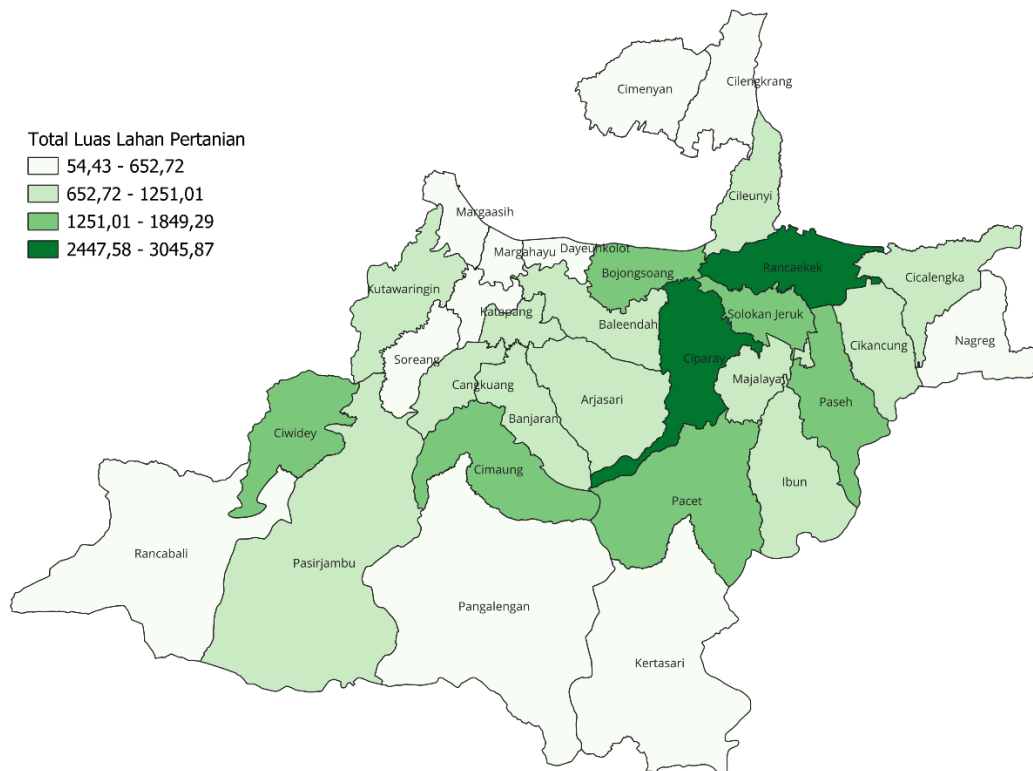
Sebelum dilakukan pemetaan spasial dan analisis perlindungan lahan, terlebih dahulu ditinjau perkembangan luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir. Hal ini penting untuk

menunjukkan dinamika ketersediaan lahan sebagai sumber daya utama dalam mendukung produksi pertanian dan ketahanan pangan.



**Gambar 1.** Luas Lahan Pertanian (Hektare) Kabupaten Bandung 2019-2024

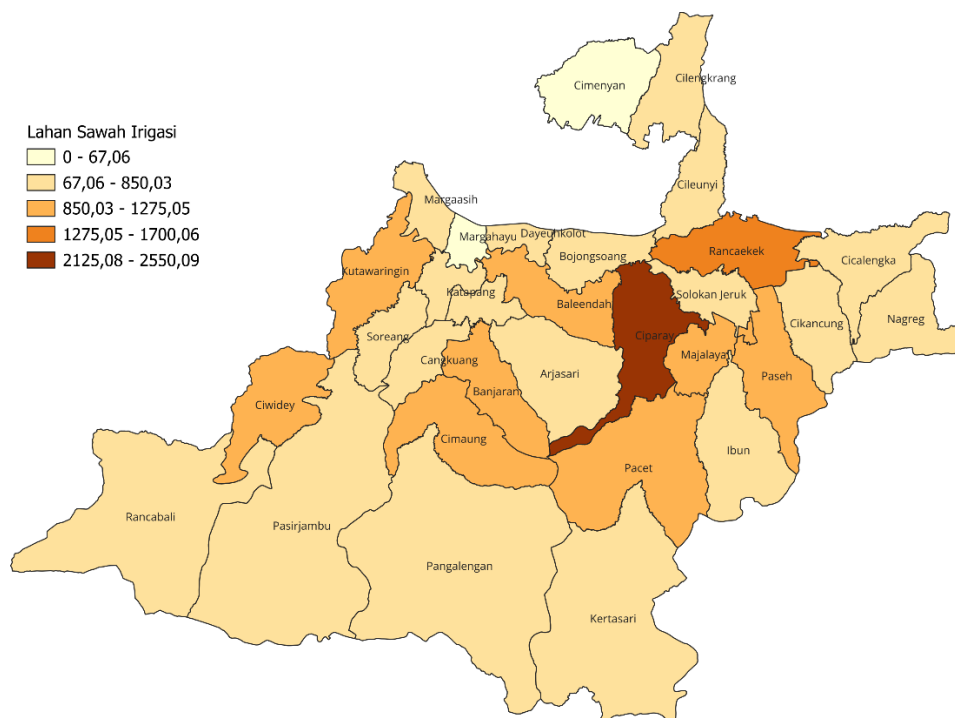
Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada 2024 sebagaimana terlihat pada **Gambar 1**. Pada tahun 2019, luas lahan pertanian mencapai 31.161 hektare, namun pada tahun 2024 tercatat hanya 28.800 hektare yang artinya terdapat penurunan sekitar 2.361 hektare atau 7,57% dalam lima tahun terakhir. Lebih lanjutnya, dari total 28.800 hektare lahan sawah pertanian, 72% atau 20.671,6 hektare merupakan lahan irigasi dan 28% lainnya atau 8.128,19 hektare adalah lahan tadah hujan.



**Gambar 2.** Sebaran Luas Lahan Pertanian (Hektare) per Kecamatan di Kabupaten Bandung 2024

**Gambar 2** menunjukkan bahwa Kecamatan dengan luas lahan pertanian terbesar adalah Rancaekek (3.045,87 ha), diikuti oleh Ciparay (2.633,57 ha), dan Solokanjeruk (1.643,39 ha). Sementara itu, kecamatan dengan luas lahan terkecil adalah Margahayu (54,43 ha), Kertasari (74,32 ha), dan Cimenyan (110,32 ha).


### 3.2.1 Sebaran Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Bandung 2024



**Gambar 3.** Sebaran Luas Lahan Sawah Irigasi (Hektare) per Kecamatan di Kabupaten Bandung 2024

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kecamatan dengan luas lahan sawah irigasi terbesar adalah Ciparay (2.550,09 ha), Rancaekek (1.582,18 ha), dan Pacet (1.166,71 ha). Ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi dan memiliki sistem irigasi yang relatif baik, sehingga mendukung pola tanam padi dua sampai tiga kali dalam setahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kecamatan tersebut merupakan sentra utama produksi padi berbasis irigasi di Kabupaten Bandung.





Lahan sawah tadah hujan cenderung mendominasi wilayah yang memiliki keterbatasan akses irigasi, namun tetap memanfaatkan lahan untuk pertanian yang bergantung pada curah hujan. Kecamatan dengan luas sawah tadah hujan terbesar antara lain Solokanjeruk (804,45 ha), Bojongsoang (888,35 ha), dan Rancaekek (1.463,69 ha). Meskipun Rancaekek memiliki luas sawah irigasi terbesar kedua, persentase lahan tadah hujannya juga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya zona campuran yang berpotensi dikembangkan untuk diversifikasi komoditas, seperti jagung, kedelai, maupun tanaman hortikultura.

Sementara itu, Kecamatan Cimenyan dan Margahayu kembali muncul sebagai wilayah dengan luas lahan tadah hujan sangat rendah yang memperkuat indikasi terbatasnya potensi pertanian lahan basah dan perlunya pendekatan seperti urban farming atau pertanian skala kecil berbasis komunitas. Secara spasial, sebaran lahan tadah hujan meluas di wilayah tengah dan utara Kabupaten Bandung yang memiliki karakteristik topografi berbukit dan akses sumber air terbatas.




### 3.3. Analisis Cakupan Perlindungan Lahan Pertanian (LP2B, AOTP, OPT)

Perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung dianalisis melalui tiga indikator, yaitu LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagai bentuk perlindungan fisik lahan, AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) sebagai perlindungan ekonomi petani, serta Penanggulangan OPT/Bencana Pertanian sebagai perlindungan teknis terhadap ancaman produksi. Ketiga indikator ini mencerminkan sejauh mana lahan, pelaku, dan sistem produksi pertanian telah terlindungi secara berkelanjutan.

**Tabel 4.** Cakupan Perlindungan Lahan Pertanian 2021-2024

Tahun	LP2B	AOTP	Penanggulangan OPT
2021	55%	0%	0,1%
2022	55%	74,24%	1,61%
2023	55%	1,74%	1,23%
2024	59%	6,02%	0,14%

Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase LP2B relatif stabil pada 55% selama tahun 2021–2023 dan meningkat menjadi 59% pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan bertambahnya luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, melainkan lebih dipengaruhi oleh penurunan total luas lahan pertanian. Dengan



kata lain, ketika lahan pertanian menyusut, proporsi LP2B menjadi terlihat lebih besar meskipun secara fisik luas LP2B tidak banyak berubah.

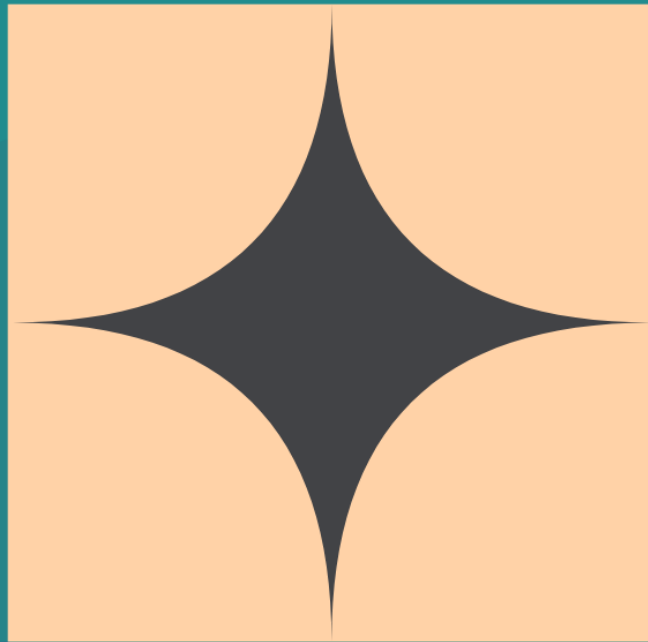
Berbeda dengan LP2B, perlindungan ekonomi melalui AOTP menunjukkan pola yang sangat tidak stabil. Pada tahun 2022, cakupan AOTP mencapai 74,24%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh program subsidi premi dan intensifikasi sosialisasi pemerintah. Namun, cakupan ini menurun tajam hingga hanya 1,74% pada 2023 dan meningkat sedikit menjadi 6,02% pada 2024. Sementara itu, perlindungan teknis melalui penanggulangan OPT dan bencana pertanian masih sangat minim, dengan cakupan tertinggi hanya 1,61% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 0,14% pada 2024.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung masih bersifat parsial. Perlindungan fisik melalui LP2B terlihat membaik secara persentase, tetapi belum mencerminkan perlindungan spasial yang substantif karena masih terjadi penyusutan lahan pertanian. Perlindungan ekonomi dan teknis justru lebih lemah,

# **BAB IV**

# **SIMPULAN DAN**

# **REKOMENDASI**




#### 4.1. Simpulan

Analisis menunjukkan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Bandung mengalami tekanan signifikan dari sisi ketersediaan maupun keberlanjutan. Selama periode 2019–2024, luas lahan pertanian menyusut sekitar 7,57% yang menandakan terjadinya alih fungsi lahan di wilayah urban dan berkembang cepat.

Secara spasial, potensi lahan pertanian tersebar tidak merata. Kecamatan Ciparay, Rancaekek, dan Pacet muncul sebagai wilayah unggulan lahan irigasi dengan dukungan sistem pengairan yang memadai dan memungkinkan pola tanam padi intensif. Sementara itu, Solokanjeruk, Bojongsoang, dan Rancaekek menjadi wilayah utama lahan tadah hujan dengan peluang besar dalam diversifikasi komoditas seperti palawija dan hortikultura. Sebaliknya, kecamatan seperti Margahayu dan Cimenyan secara konsisten menunjukkan potensi pertanian terendah baik dari aspek irigasi maupun tadah hujan.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terlindungi dengan baik. Perlindungan lahan melalui LP2B secara persentase memang meningkat dari 55% menjadi 59% pada 2024, tetapi kenaikan ini lebih disebabkan oleh penyusutan total luas lahan pertanian bukan karena




adanya penambahan wilayah yang secara substantif ditetapkan sebagai lahan terlindungi. Pada saat yang sama, perlindungan ekonomi melalui program AOTP menunjukkan fluktuasi tinggi dengan capaian tertinggi 74,24% pada 2022, namun turun tajam pada dua tahun berikutnya yang mencerminkan ketidakstabilan dukungan terhadap petani. Perlindungan teknis melalui pengendalian OPT dan bencana pertanian juga masih sangat terbatas dengan cakupan selalu berada di bawah 2%, meskipun ancaman hama dan perubahan iklim semakin meningkat.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bandung tetap memiliki potensi pertanian strategis terutama di wilayah dengan lahan irigasi kuat serta wilayah dengan lahan tadah hujan yang produktif. Namun, upaya perlindungan lahan saat ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Sinergi antara perlindungan spasial (LP2B), perlindungan ekonomi (AOTP), dan perlindungan teknis (OPT) belum optimal sehingga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan pangan jangka panjang belum sepenuhnya terjamin.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis spasial dan kuantitatif, penguatan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung perlu dilakukan melalui pendekatan spasial, ekonomi, dan teknis secara terpadu. Secara spasial, kecamatan dengan potensi pertanian tinggi seperti Ciparay, Rancaekek, dan Pacet perlu ditetapkan sebagai wilayah LP2B secara substantif dan bukan hanya meningkatkan proporsi LP2B secara nominal. Demikian pula, wilayah tadah hujan potensial seperti Solokanjeruk dan Bojongsoang perlu dimasukkan dalam kawasan perlindungan karena memiliki peluang pengembangan komoditas unggulan dan pertanian adaptif iklim. Untuk itu, pemutakhiran peta LP2B berbasis GIS menjadi penting agar kebijakan perlindungan lahan terarah pada wilayah produktif dan potensial, serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengendalikan alih fungsi lahan, khususnya di kecamatan urban seperti Margahayu, Baleendah, dan Cileunyi.

Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Bandung perlu diarahkan pada pendekatan konvergensi antara perlindungan spasial (LP2B), ekonomi (AOTP), dan teknis (OPT),



yang dikombinasikan dengan penguatan kelembagaan lokal, pemutakhiran sistem informasi berbasis wilayah, serta optimalisasi peran koperasi dan kelompok tani. Melalui strategi terpadu dan berbasis wilayah prioritas, Kabupaten Bandung memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pertanian yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan daerah.